

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemiskinan ialah persoalan yang sampai sekarang tetap menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, baik pada negara berkembang dan maju. Kemiskinan bukan sekedar berkaitan dengan ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokok serta mencerminkan keterbatasan kesempatan untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan distribusi pendapatan yang adil (Todaro and Smith, 2015). Kemiskinan menjadi salah satu ukuran utama dalam mengevaluasi pencapaian pembangunan nasional dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

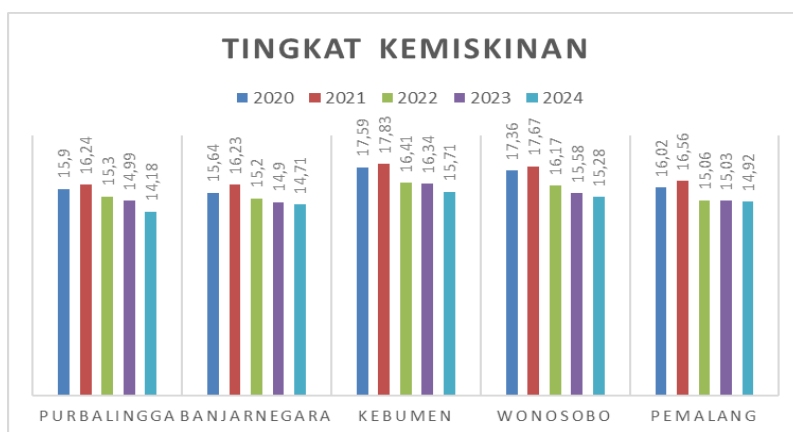
Berbagai kebijakan dan program telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan, baik dari bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun pembangunan infrastruktur ekonomi. Namun, permasalahan kemiskinan masih terus terjadi dan cenderung mengalami fluktuasi akibat pengaruh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat Mutu tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, situasi lapangan pekerjaan belum stabil, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Maka dari itu, penurunan kemiskinan bukan hanya memerlukan menaikkan aktivitas ekonomi, serta membutuhkan peningkatan kualitas pembangunan manusia, perluasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, serta pemerataan hasil pembangunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan pembangunan yang memerlukan perhatian

serius. Meskipun secara umum persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan dalam jangka panjang, namun pada periode tertentu tingkat kemiskinan dapat mengalami kenaikan akibat tekanan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan ialah kondisi yang dinamis dan dipengaruhi oleh beragam aspek sosial dan ekonomi.

Selain itu, BPS juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan antar wilayah di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Daerah yang memiliki kualitas pembangunan manusia lebih rendah dan ketimpangan pendapatan yang besar umumnya punya persentase penduduk miskin yang lebih besar. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, kemiskinan masih menjadi isu pembangunan yang cukup dominan, khususnya di daerah kabupaten dengan kondisi perekonomian yang didominasi sektor primer dan informal. Kondisi tersebut mengindikasikan kualitas sumber daya manusia, kondisi ketenagakerjaan, serta ketimpangan pendapatan menjadi faktor strategis dalam menekan kemiskinan.

Gambar 1.1 Presentase Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah



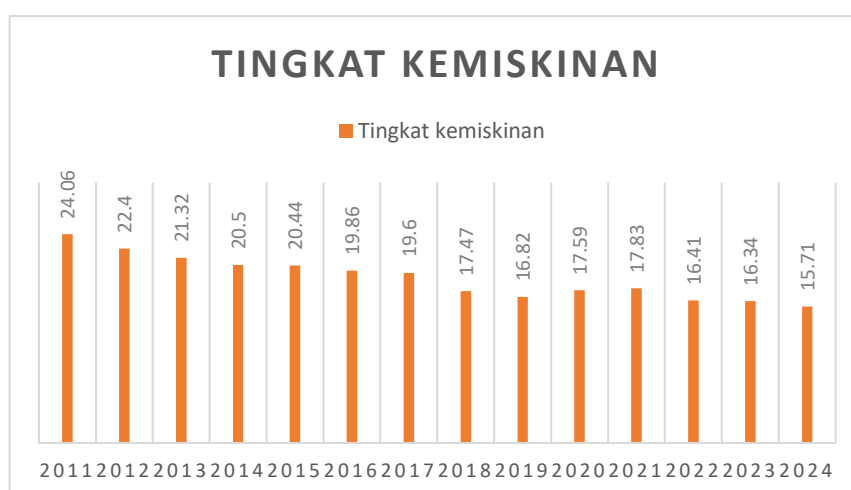
Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Merujuk informasi pada data tersebut, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih bervariasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemiskinan belum

sepenuhnya dapat ditekan secara stabil dan memerlukan strategi pembangunan yang lebih efektif, terutama melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia, peningkatan partisipasi tenaga kerja, serta pengurangan ketimpangan pendapatan. Kabupaten Kebumen termasuk satu dari wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang tetap mengalami permasalahan kemiskinan, Kabupaten Kebumen secara terus punya tingkat kemiskinan relatif besar dibandingkan kabupaten maupun kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kebumen beberapa tahun terakhir menempati posisi dengan proporsi masyarakat miskin tertinggi di Jawa Tengah, khususnya rentang 2020-2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Kabupaten Kebumen tetap menjadi isu pembangunan yang penting dan memerlukan kajian lebih mendalam. Selain itu, Kabupaten Kebumen juga menunjukkan dinamika pada indikator pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan ketimpangan pendapatan, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam menganalisis determinan tingkat kemiskinan.

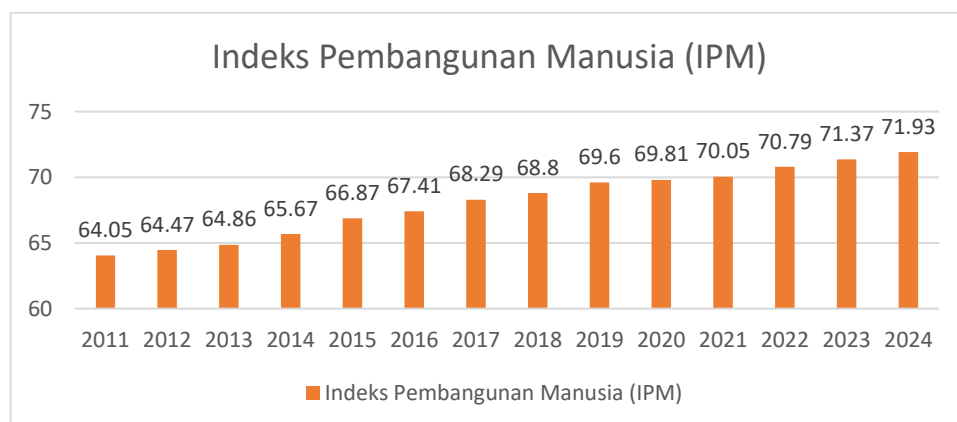
Gambar 1.2 Presentase Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kebumen Periode 2011-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Merujuk dari Badan Pusat Statistik (2024) Kabupaten Kebumen, tingkat kemiskinan di wilayah ini masih termasuk cukup besar jika disandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen turut mengalami fluktuasi pada setiap periode tahunan. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tetap memerlukan evaluasi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pada tahun 2011 penduduk miskin sebesar 20,06% namun mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 menjadi 16,82% dan mengalami kenaikan lagi, persentase kemiskinan meningkat awalnya 17,59% kemudian 2020 menjadi 17,83% pada periode 2021 dan secara konsisten kembali turun di 2022-2024 di angka 16,41%-15,71. Selain kemiskinan, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. IPM Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang menandakan adanya perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta taraf hidup masyarakat. Namun demikian, peningkatan IPM tidak secara otomatis dapat menurunkan tingkat kemiskinan apabila tidak diiringi dengan pemerataan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kebumen Periode 2011-2014

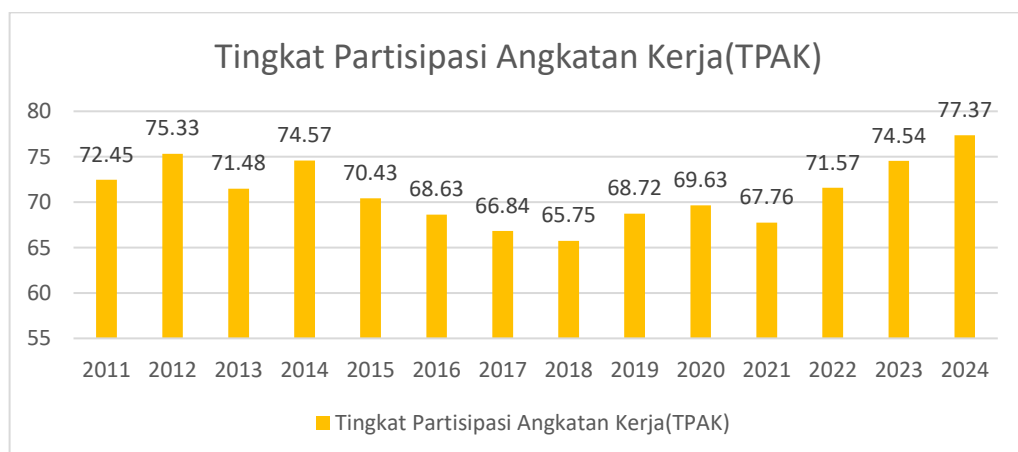


Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Dari informasi yang tersedia, bisa ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Kebumen mengalami tren peningkatan. Peningkatan IPM ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia. Pada Tahun 2024 IPM Kabupaten Kebumen memiliki nilai yang hampir menyamai IPM rerata Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil tersebut menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan kapasitas pembangunan manusia di wilayah ini. Namun demikian, apabila tingkat kemiskinan masih relatif tinggi, maka dapat diindikasikan bahwa peningkatan kualitas manusia belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata.

Dari aspek ketenagakerjaan, indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga memiliki peran krusial guna menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. TPAK menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi TPAK seharusnya menggambarkan semakin besarnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produktif.

Gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kebumen Periode 2011-2024

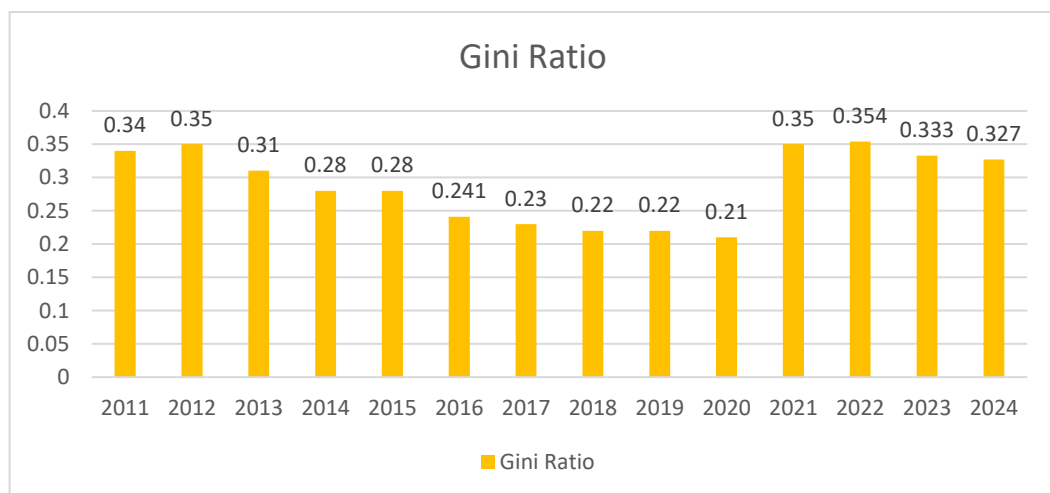


Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Data yang tersedia memperlihatkan bahwa TPAK di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat di kegiatan ekonomi memiliki sifat fluktuatif dan erat kaitannya dengan kondisi pasar kerja serta tingkat pendidikan masyarakat. TPAK memiliki pengaruh terhadap kemiskinan karena semakin besar proporsi penduduk yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan maka semakin besar peluang rumah tangga memperoleh pendapatan. Pendapatan yang meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan Tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio merupakan indikator penting dalam melihat pemerataan hasil pembangunan. Gini Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat belum merata, sehingga kelompok berpendapatan rendah tidak memperoleh manfaat pembangunan secara optimal. Kondisi ini berpotensi mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Gambar 1.5 Gini Rasio Kabupaten Kebumen periode 2011-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Data yang tersedia menggambarkan Gini Rasio Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi. Gini Rasio mencerminkan Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam wilayah tertentu. Semakin besar angka Gini Rasio, semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini menyebabkan Sebagian besar penduduk berpendapatan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga cenderung Tingkat kemiskinan meningkat. Berdasarkan Gambar 1.5 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut belum sepenuhnya terkendali. Ketimpangan yang terus terjadi dapat menjadi penghambat dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya cukup diarahkan pada peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi perlu disertai dengan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kemiskinan muncul sebagai dampak dari proses pembangunan tersebut. Ilmu ekonomi telah menyatakan berbagai teori yang menjelaskan bahwa pencapaian pembangunan tidak hanya dinilai berdasarkan peningkatan output, tetapi juga dari tingkat pemerataan manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Para ekonom pada umumnya sepakat bahwa pembangunan yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi yang dapat menghambat penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, pengendalian ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui Gini Rasio menjadi penting agar peningkatan pendapatan per kapita dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan taraf hidup yang lebih merata.

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya, landasan teori dan fenomena empiris yang terjadi di Kabupaten Kebumen. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipilih karena menunjukkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan hidup layak yang dimana secara teoritis berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dipilih karena menggambarkan kontribusi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi produktif yang berhubungan langsung dengan pendapatan rumah tangga. Sementara itu, variabel Gini Rasio dipilih untuk merepresentasikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil yang diperoleh dari berbagai penelitian menunjukkan temuan yang beragam dan belum sepenuhnya konsisten dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, para peneliti mengemukakan perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait determinan kemiskinan. Penelitian lanjutan tersebut diperlukan melalui serangkaian pengujian empiris guna mengidentifikasi karakteristik dan pengaruh masing-masing faktor yang berhubungan dengan kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kebumen dengan judul **“Determinasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Gini Rasio Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kebumen.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang sudah dijelaskan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kebumen?
2. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kebumen?
3. Apakah Gini Rasio berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kebumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diberikan untuk tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kebumen.
3. Untuk mengetahui pengaruh Gini Rasio Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, diantaranya:

1. Agar menghindari pembahasan yang melebar, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini supaya kajian yang dilakukan menjadi lebih terarah, dan terfokus.
2. Data yang dipakai dipenelitian ini berupa data runtut waktu periode 2011 sampai 2024 di Kabupaten Kebumen.
3. Variabel yang dipakai ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Gini Rasio sebagai variabel *independent* dan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel *dependent*.

1.5 Manfaat Penelitian

Ini merupakan beberapa sumbangsih yang diberikan sebagai luaran dari penelitian ini:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta memperluas pemahaman dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Gini Rasio terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Bagi Pemerintah

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bisa menjadi referensi masukan dan pertimbangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna, khususnya di upaya penanggulangan kemiskinan dengan menaikkan

kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, dan pengurangan ketimpangan pendapatan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber data dan pemahaman untuk masyarakat dari berbagai dampak yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen, sehingga bisa menumbuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.